



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

KABUPATEN KUTAI TIMUR



KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian tujuan dan sasaran strategis Tahun 2025. Laporan Kinerja ini merupakan tahun ke-4 pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2021-2026. Penyusunan Laporan Kinerja ini mengacu pada Peraturan Menteri PANRB No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Riviur atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2021-2026 .

Laporan Kinerja ini merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas yang berfungsi sebagai alat penilaian kinerja, wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat serta merupakan alat kendali dan alat pemacu peningkatan kinerja setiap unit organisasi di lingkungan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman. Kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman diukur atas dasar penilaian indikator kinerja utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2025.

Secara umum capaian kinerja sasaran telah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, meskipun, beberapa indikator belum menunjukkan capaian sesuai target. Pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi sangat ditentukan oleh komitmen, keterlibatan dan dukungan aktif segenap komponen aparatur negara, masyarakat, dunia usaha dan *civil society* sebagai bagian integral dari pembaharuan sistem administrasi negara.

Berdasarkan analisis dan evaluasi obyektif yang dilakukan melalui Laporan Kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2025 ini, diharapkan dapat terjadi optimalisasi peran kelembagaan dan peningkatan efisiensi, efektivitas, dan produktivitas kinerja seluruh jajaran pejabat dan pelaksana di lingkungan Dinas



Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman pada tahun-tahun selanjutnya, sehingga dapat mendukung kinerja Pemerintah Daerah secara keseluruhan dalam mewujudkan *Good Governance* dan *Clean Government*.

Kabupaten Kutai Timur,

30 Januari 2025

KEPALA DINAS,

KABUPATEN KUTAI TIMUR

AHMAD IIP MAKRUF, S.T,M.T.

Pembina Tingkat 1 / IV b



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Struktur Organisasi dan Tata Kerja
- C. Isu Strategis Perangkat Daerah
- D. Landasan Hukum
- E. Sistematika

BAB II PERENCANAAN KINERJA

- A. Rencana Strategis
- B. Rencana Kinerja Tahun 2025
- C. Perjanjian Kinerja Tahun 2025

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

- A. Capaian Kinerja Organisasi
- B. Realisasi Anggaran
- C. Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

BAB IV PENUTUP

LAMPIRAN

SK TIM SAKIP PERANGKAT DAERAH

MATRIKS RENSTRA

SK PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

PERJANJIAN KINERJA KEPALA PERANGKAT DAERAH

BAB I PENDAHULUAN





BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Perangkat Daerah sebagai sub sistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan perangkat daerah, capaian tujuan dan sasaran perangkat daerah yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Provinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate



sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaran negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka di terbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sehubungan dengan hal tersebut Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kutai Timur diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP). Penyusunan LKJIP Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025 yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran terkait pencapaian kinerja tujuan dan sasaran perangkat daerah yang telah ditetapkan dan diperjanjikan pada perjanjian kinerja perangkat daerah.

B. Struktur Organisasi dan Tata Kerja

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Kutai Timur Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

1. Kepala Dinas

- Kepala Disperkim mempunyai tugas meliputi :
 - a. Merencanakan ;
 - b. Merumuskan kebijakan ;
 - c. Membina administrasi dan teknis ;
 - d. Mengkoordinasikan ;
 - e. Mengendalikan ;
 - f. Mengevaluasi bidang perumahan ; dan
 - g. Pengembangan kawasan permukiman.



- Kepala Disperkim mempunyai fungsi sebagai berikut :
 - a. Perencanaan dan pengendalian anggaran ;
 - b. Penyelenggaraan urusan perumahan, dan pengembangan kawasan permukiman sesuai dengan lingkup tugas,
 - c. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama fasilitasi pembangunan bidang perumahan, dan pengembangan kawasan permukiman diantara Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah dan instansi terkait,
 - d. Pengendalian urusan administrasi Disperkim;
 - e. Penilaian dan pengendalian terhadap pelaksanaan hasil program kegiatan;
 - f. Pembinaan bidang perumahan, dan pengembangan kawasan permukiman;
 - g. Perumusan dan penetapan Standar Operasional Prosedur, target capaian Standar Pelayanan Minimal, Standar Pelayanan Publik, dan Indeks Keopuasan Masyarakat bidang perumahan, dan pengembangan kawasan permukiman;
 - h. Perumusan kebijakan, pengendalian, dan pengevaluasian rencana strategis dan rencana kerja bidang perumahan dan pengembangan kawasan permukiman; dan
 - i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana diuraikan diatas, disusunlah struktur organisasi dan tatakerja yaitu Kepala Dinas sebagai pimpinan, yang dibantu oleh Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Sub Bidang. Berikut bagan struktur organisasi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kutai Timur.



C. Isu Strategis Perangkat Daerah

Isu Strategis Perangkat adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan perangkat daerah karena dampaknya yang signifikan bagi perangkat daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan perangkat di masa yang akan datang dalam rangka menunjang pembangunan daerah.

Isu strategis perangkat daerah yang akan ditangani pada kurun waktu 5 (lima) tahun sebagaimana tertuang pada Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman periode 2021-2026 sebagai berikut :

1. Penanganan rumah layak huni belum berkesinambungan ;
2. Masih terdapatnya kawasan kumuh khususnya di perkotaan.
3. Belum memadainya sanitasi di beberapa wilayah permukiman.
4. Perlunya Peningkatan Sarana Prasarana Transportasi sebagai sarana pencapaian sasaran Peningkatan Konektivitas Antar Wilayah.
5. Perlunya Peningkatan Prasaran, Sarana dan Utilitas Kawasan Permukiman sebagai sarana pencapaian sasaran Peningkatan Infrastruktur Fasilitas Perumahan/ permukiman.

Perumusan Isu strategis pada tahun 2025 mengacu pada Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman periode 2021-2026, Arah Kebijakan Pemerintah Daerah, dan Hasil Evaluasi Capaian Kinerja tahun sebelumnya. Isu Strategis yang ditangani pada tahun 2025 sebagai berikut :

1. Penanganan rumah layak huni belum berkesinambungan ;
2. Masih terdapatnya kawasan kumuh khususnya di perkotaan ;
3. Belum memadainya sanitasi di beberapa wilayah permukiman ;



4. Perlunya Peningkatan Sarana Prasarana Transportasi sebagai sarana pencapaian sasaran Peningkatan Konektivitas Antar Wilayah ;
5. Perlunya Peningkatan Prasaran, Sarana dan Utilitas Kawasan Permukiman sebagai sarana pencapaian sasaran Peningkatan Infrastruktur Fasilitas Perumahan/ permukiman.

D. Landasan Hukum

Laporan Kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut :

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021-2026;
4. Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 92 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
5. Peraturan Bupati Kabupaten Kutai Timur Nomor 27 Tahun 2020 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;
6. Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 19 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;



E. Sistematika

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025 adalah :

BAB I	PENDAHULUAN
	Meliputi Gambaran Umum, Tugas dan Fungsi, Isu Strategis yang dihadapi SKPD, Dasar Hukum dan Sistematika.
BAB II	PERENCANAAN KINERJA
	Meliputi Perencanaan Strategis Perangkat Daerah.
BAB III	AKUNTABILITAS KINERJA
	Meliputi Capaian IKU, Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja serta Akuntabilitas Keuangan.
BAB IV	PENUTUP

BAB II

PERENCANAAN KINERJA





BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kutai Timur adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistematis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Daerah yang bersangkutan, dalam hal ini Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kutai Timur. Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kutai Timur yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2021 sampai dengan Tahun 2025 ditetapkan dengan Peraturan Bupati Kabupaten Kutai Timur Nomor 27 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026. Penetapan jangka waktu 5 tahun tersebut dihubungkan dengan pola pertanggungjawaban Kepala Daerah terkait dengan penetapan/kebijakan bahwa Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kutai Timur dibuat pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah daerah akan menjadi akuntabel.

Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kutai Timur tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021-2026.

Penyusunan Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kutai Timur telah melalui tahapan - tahapan yang simultan dengan proses penyusunan RPJMD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021-2026 dengan melibatkan *stakeholders* pada saat dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD, Forum Perangkat Daerah, sehingga



Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kutai Timur merupakan hasil kesepakatan bersama antara Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kutai Timur dan stakeholder.

Selanjutnya, Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kutai Timur tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Di dalam Renja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kutai Timur dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

1. Visi

Visi adalah gambaran kondisi ideal yang diinginkan pada masa mendatang oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Timur.

Visi Pemerintah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021-2026 adalah:

“Menata Kutai Timur Sejahtera Untuk Semua”

2. Misi

Sedangkan untuk mewujudkan Visi Pemerintah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021-2026 tersebut diatas dilaksanakan Misi sebagai berikut :

- Misi 1 ; Mewujudkan masyarakat yang berakhlak mulia, berbudaya dan bersatu
- Misi 2 ; Mewujudkan Daya Saing Ekonomi Masyarakat Berbasis Sektor Pertanian
- Misi 3 ; Mewujudkan Pelayanan Dasar Bagi Masyarakat Secara Proporsional dan Merata



- Misi 4 ; Mewujudkan Pemerintahan Yang Partisipatif Berbasis Penegakan Hukum Dan Teknologi Informasi
- Misi 5 ; Mewujudkan Sinergitas Pengembangan Wilayah dan Integrasi Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan

Perumusan tujuan dan sasaran Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman mengacu pada Misi ke-3, yaitu :

‘Mewujudkan Pelayanan Dasar Bagi Masyarakat Secara Proporsional dan Merata.’

3. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis. Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai Visi dan Misi Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021-2026 sebanyak 8 (delapan) tujuan dan 17 (tujuh belas) sasaran strategis.

Sebagaimana visi dan misi yang telah ditetapkan, untuk keberhasilan tersebut perlu ditetapkan tujuan, sasaran berikut indikator dan target Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kutai Timur sebagai berikut :



Tabel 2.1
Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Kinerja
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kutai
Timur

NO	TUJUAN	SASARAN		INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PADA TAHUN				
					2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Menata semua layanan kebutuhan infrastruktur dasar dan Ekonomi Bagi Masyarakat Secara Proporsional dan Merata			IPD (Indek Pembangunan Desa)	68,11	69,72	71,32	72,93	74,53
		1.1	Meningkatnya Konektivitas Antar Wilayah	Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	18,09	21,70	26,05	31	37,51
		1.2	Meningkatnya Infrastruktur Fasilitas Perumahan/permukiman	Persentase penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana	0	0,9847	1,2309	1,4771	1,7233
				Persentase Kawasan	30,67	22,69	24,91	42,35	47,33



NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PADA TAHUN				
				2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			Permukiman Kumuh dibawah 10 ha di kabupaten yang ditangani					
			Berkurangnya jumlah unit RTLH	0,2486	0,249	0,2493	0,24942	0,24943
			Cakupan Penerbitan Ijin Pengembangan	62,857	69,143	76,057	83,663	92,029

Sumber : Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman periode 2021-2026

4. Indikator Kinerja Utama

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah. Adapun penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kutai Timur tahun 2025 adalah sebagai berikut:



Tabel 2.2
Indikator Kinerja Utama
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kutai Timur

NO	TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN		
				DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI/RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1.	Menata semua layanan kebutuhan infrastruktur dasar dan Ekonomi Bagi Masyarakat Secara Proporsional dan Merata	IPD (Indek Pembangunan Desa)	Indeks	Menghitung Indeks Pembangunan Desa	$IPD (b_1 \cdot V_1 + b_2 \cdot V_2 + b_3 \cdot V_3 + \dots + b_{42} \cdot V_{42}) \cdot 20$ Keterangan: IPD = Nilai IPD setiap desa (bernilai 0 - 100) V_1 = Skor indikator ke - 1 V_2 = Skor indikator ke - 2 V_3 = Skor indikator ke - 3 . . . V_{42} = Skor indikator ke - 42 b_1 = Penimbang/pembobot indikator ke - 1 b_2 = Penimbang/pembobot indikator ke - 2 b_3 = Penimbang/pembobot indikator ke - 3 . . . b_{42} = Penimbang/pembobot indikator ke - 42	RPJMD 2021-2016
1.1	Meningkatnya Konektivitas Antar Wilayah	1.1.1 Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	Persen	Mengukur persentase unit rumah yang sedang dibangun terfasilitasi PSU	$\frac{\text{Jumlah unit rumah yang sedang dibangun terfasilitasi PSU}}{\text{Jumlah unit rumah kab/kota}} \times 100\%$	RPJMD 2021-2016



1.2	Meningkatnya Infrastruktur Fasilitas Perumahan/permukiman	1.2.1	Persentase penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana	Persen	Mengukur capaian kinerja penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	$\frac{\text{Jumlah unit rumah korban bencana yang ditangani pada tahun } n}{\text{Jumlah total rencana unit rumah korban bencana yang akan ditangani pada tahun } n} \times 100 \%$	RPJMD 2021-2016
		1.2.2	Persentase Kawasan Permukiman Kumuh dibawah 10 ha di kabupaten yang ditangani	Persen	Mengukur persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/ kota yang ditangani	$\frac{\text{Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha yang ditangani (ha)}}{\text{Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha}} \times 100 \%$	RPJMD 2021-2016
		1.2.3	Berkurangnya jumlah unit RTLH	Persen	Mengukur penurunan jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	$\frac{\text{Jumlah unit rumah tidak layak huni}}{\text{Jumlah total unit rumah kabupaten/kota}} \times 100 \%$	RPJMD 2021-2016
		1.2.4	Cakupan Penerbitan Ijin Pengembangan	Persen	Mengukur presentase cakupan penerbitan ijin pengembangan	$\frac{\text{Jumlah Ijin Pengembangan}}{\text{Jumlah Perumahan Kabupaten}} \times 100 \%$	RPJMD 2021-2016

Sumber : Indikator Kinerja Utama Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2025



B. Rencana Kerja Tahun 2025

Rencana kerja tahunan (RKT) merupakan penjabaran dari tujuan, sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra, dan akan dilaksanakan oleh perangkat daerah melalui berbagai kegiatan tahunan. Rencana Kerja Tahun 2025 termuat di dalam dokumen Renja Perangkat Daerah Tahun 2025. Berikut Rencana Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2025 :

Tabel 2.3

Rencana Kerja Tahun 2025

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kutai Timur

NO	TUJUAN	SASARAN		INDIKATOR KINERJA	SAT.	TARGET
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)
1	Menata semua layanan kebutuhan infrastruktur dasar dan Ekonomi Bagi Masyarakat Secara Proporsional dan Merata		IPD (Indek Pembangunan Desa)		Indeks	71,32
		1.1	Meningkatnya Konektivitas Antar Wilayah	Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	Persen	26,05



NO	TUJUAN	SASARAN		INDIKATOR KINERJA	SAT.	TARGET
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)
		1.2	Meningkatnya Infrastruktur Fasilitas Perumahan/ permukiman	Persentase penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana	Persen	1,2309
				Persentase Kawasan Permukiman Kumuh dibawah 10 ha di kabupaten yang ditangani	Persen	24,91
				Berkurangnya jumlah unit RTLH	Persen	0,2493
				Cakupan Penerbitan Ijin Pengembangan	Persen	76,057

Sumber : Rencana Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kutai Timur tahun 2025

C. Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencanaan kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan



Perjanjian Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025 mengacu pada dokumen Renstra Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021-2026, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025, dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2025. Pada tanggal 07 bulan Januari tahun 2025 ditetapkan Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kutai Timur dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 2.4
Perjanjian Kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025

NO	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET
1	2	3		4	5
1	Menata semua layanan kebutuhan infrastruktur dasar dan Ekonomi Bagi Masyarakat Secara Proporsional dan Merata	1.1	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Keuangan	Persen	100
		1.2	Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	Persen	31
		1.3	Persentase penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana	Persen	1,4771
		1.4	Persentase Kawasan Permukiman Kumuh dibawah 10 ha di kabupaten yang ditangani	Persen	42,35
		1.5	Berkurangnya jumlah unit RTLH	Persen	0,2492
		1.6	Cakupan Penerbitan Ijin Pengembangan	Persen	83,663

Sumber : Perjanjian Kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2025



Dalam rangka pencapaian kinerja yang telah ditetapkan, dilaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang telah ditetapkan. Berikut rincian program dan kegiatan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman :

Tabel 2.5

**Program dan Kegiatan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Tahun 2025**

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target Kinerja	Pagu
1	2	3	4	5
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman				1.630.164.095.803,00
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman				1.623.907.095.803,00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Presentase Tata Kelola Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan			33.167.068.947,00
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	7	1.350.000.000,00
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	7	650.000.000,00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	2	200.000.000,00



Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target Kinerja	Pagu
1	2	3	4	5
Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun	Dokumen	3	500.000.000,00
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dokumen	3	26.481.020.253,00
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	160	25.331.020.253,00
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	2	850.000.000,00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	19	300.000.000,00
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Dokumen	2	50.000.000,00
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1	25.000.000,00
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	1	25.000.000,00
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Dokumen	2	850.000.000,00



Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target Kinerja	Pagu
1	2	3	4	5
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	1	200.000.000,00
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	25	650.000.000,00
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dokumen	3	700.000.000,00
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Paket	1	200.000.000,00
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	1	450.000.000,00
Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dokumen	1	50.000.000,00
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	unit	8	2.055.200.000,00
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	unit	6	1.555.200.000,00
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	unit	2	500.000.000,00
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Laporan	2	1.380.848.694,00



Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target Kinerja	Pagu
1	2	3	4	5
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	1	336.000.000,00
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	1	1.044.848.694,00
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Paket	2	300.000.000,00
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	unit	3	200.000.000,00
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jenis	5	100.000.000,00
PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			25.200.000.000,00
Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Persentase penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana	Dokumen	5	500.000.000,00
Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	Tersedianya data Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Dokumen	3	300.000.000,00



Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target Kinerja	Pagu
1	2	3	4	5
Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen data Rumah yang Terkena Bencana Kabupaten/Kota berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah	Dokumen	2	200.000.000,00
Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kab/Kota	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Kali	2	200.000.000,00
Sosialisasi tentang Mekanisme Penggantian Hak atas Tanah dan Bangunan	Terlaksananya Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kab/Kota	Orang	50	200.000.000,00
Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kab/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Tentang Mekanisme Penggantian Hak atas Tanah dan/atau Bangunan	unit	1	24.500.000.000,00
Rehabilitasi Rumah Bagi Korban Bencana	Terlaksananya Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kab/Kota	unit	10	6.000.000.000,00
Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi	unit	31	4.000.000.000,00
Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan Perumahan pada Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun	unit	8	1.000.000.000,00



Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target Kinerja	Pagu
1	2	3	4	5
Pembangunan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah pada Lokasi Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan	unit	105	13.500.000.000,00
PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Jumlah Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota			652.137.666.856,00
Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Persentase Kawasan Permukiman Kumuh dibawah 10 ha di kabupaten yang ditangani	Dokumen	1	1.000.000.000,00
Penyusunan/Review/Legalisa si Kebijakan PKP	Terlaksananya Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Dokumen	1	1.000.000.000,00
Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/T erlegalisasi	Dokumen	1	651.137.666.856,00
Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Terlaksananya Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	unit	111	21.409.900.000,00
Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	Dokumen	1	621.727.766.856,00



Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target Kinerja	Pagu
1	2	3	4	5
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran / Peremajaan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Kesepakatan Kerja Sama dalam Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU	Laporan	1	500.000.000,00
Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Dokumen	1	1.000.000.000,00
Pelaksanaan Permukiman Kembali Kawasan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Data Permukiman Kumuh yang Terverifikasi	Ha	2	500.000.000,00
Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh	Luas Kawasan Permukiman Kumuh yang Dimukimkan Kembali	Ha	1	6.000.000.000,00
PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Luas Permukiman Kumuh yang Dipugar			500.000.000,00
Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Berkurangnya jumlah unit RTLH >10 ha	Laporan	1	500.000.000,00
Pengawasan dan Pengendalian dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru	Terlaksananya Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Laporan	1	300.000.000,00



Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target Kinerja	Pagu
1	2	3	4	5
Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru	Orang	20	200.000.000,00
PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Jumlah Orang yang Mengikuti Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh			912.802.360.000,00
Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)			912.802.360.000,00
Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Terlaksananya Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Dokumen	3	1.009.900.000,00
Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Lokasi	18	911.792.460.000,00
PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian			100.000.000,00
Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum	Cakupan Penerbitan Ijin Pengembangan	Laporan	1	100.000.000,00



Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target Kinerja	Pagu
1	2	3	4	5
PSU Tingkat Kemampuan Kecil				
Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil	Terlaksananya Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Kecil	Laporan	1	100.000.000,00
UPT Pertamanan dan Pemakaman Sangatta Utara	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil			4.037.000.000,00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Presentase Tata Kelola Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan			3.637.000.000,00
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Paket	1	650.000.000,00
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	50.000.000,00
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	600.000.000,00



Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target Kinerja	Pagu
1	2	3	4	5
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Paket	1	765.000.000,00
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	3	765.000.000,00
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	1	2.162.000.000,00
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	1	2.162.000.000,00
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jenis	1	60.000.000,00
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jenis	3	60.000.000,00
PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)			400.000.000,00
Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Tersedianya Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Lokasi	1	400.000.000,00



Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target Kinerja	Pagu
1	2	3	4	5
Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	Lokasi	1	400.000.000,00
UPT Pertamanan dan Pemakaman Sangatta Selatan				2.220.000.000,00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Presentase Tata Kelola Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan			1.700.000.000,00
Administrasi Umum Perangkat Daerah		Paket	1	350.000.000,00
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	100.000.000,00
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	200.000.000,00
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	50.000.000,00
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Paket	1	450.000.000,00
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	4	450.000.000,00
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	1	900.000.000,00



Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target Kinerja	Pagu
1	2	3	4	5
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	1	900.000.000,00
PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)			520.000.000,00
Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Tersedianya Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Lokasi	1	520.000.000,00
Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	Lokasi	1	520.000.000,00

Sumber : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2025

Perjanjian Kinerja dapat direvisi atau disesuaikan dalam hal terjadi kondisi sebagai berikut:

1. Terjadi pergantian atau mutasi pejabat;
2. Perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran (perubahan program, kegiatan dan alokasi anggaran);
3. Perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran.



Pada tanggal 27 bulan Oktober tahun 2025 dilaksanakan Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dikarenakan perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran (perubahan program, kegiatan dan alokasi anggaran); dengan uraian target kinerja sebagai berikut :

Tabel 2.6

**Perubahan Perjanjian Kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan
Permukiman Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025**

NO	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET
1	2	3		4	5
1	Menata semua layanan kebutuhan infrastruktur dasar dan Ekonomi Bagi Masyarakat Secara Proporsional dan Merata	1.1	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Keuangan	Persen	100
		1.2	Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	Persen	31
		1.3	Persentase penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana	Persen	1,4771
		1.4	Persentase Kawasan Permukiman Kumuh dibawah 10 ha di kabupaten yang ditangani	Persen	42,35
		1.5	Berkurangnya jumlah unit RTLH	Persen	0,2492



NO	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET
1	2	3		4	5
		1.6	Cakupan Penerbitan Ijin Pengembangan	Persen	83,663

Sumber : Perubahan Perjanjian Kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2025

Dengan rincian program dan kegiatan sebagai berikut :

Tabel 2.7

Perubahan Program dan Kegiatan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2025

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target Kinerja	Pagu
1	2	3	4	5
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman				1.561.820.806.582,00
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman				1.557.662.005.184,00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Presentase Tata Kelola Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan			33.659.692.222,00
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	7	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	7	269.508.000,00



Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target Kinerja	Pagu
1	2	3	4	5
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	2	150.813.000,00
Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun	Dokumen	3	141.733.000,00
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dokumen	3	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	160	24.782.283.256,00
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	2	476.828.000,00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	19	156.712.000,00
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Dokumen	2	
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1	0,00
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	1	0,00



Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target Kinerja	Pagu
1	2	3	4	5
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Dokumen	2	
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	1	200.000.000,00
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	25	0,00
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dokumen	3	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Paket	1	156.898.205,00
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	1	294.378.000,00
Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dokumen	1	39.958.861,00
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	unit	8	
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	unit	6	1.748.232.000,00
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	unit	2	3.213.262.000,00
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Laporan	2	



Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target Kinerja	Pagu
1	2	3	4	5
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	1	336.000.000,00
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	1	1.393.085.900,00
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Paket	2	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	unit	3	200.000.000,00
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jenis	5	100.000.000,00
PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			33.591.704.900,00
Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Persentase penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana	Dokumen	5	
Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	Tersedianya data Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Dokumen	3	249.822.000,00



Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target Kinerja	Pagu
1	2	3	4	5
Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen data Rumah yang Terkena Bencana Kabupaten/Kota berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah	Dokumen	2	748.999.000,00
Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kab/Kota	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Kali	2	
Sosialisasi tentang Mekanisme Penggantian Hak atas Tanah dan Bangunan	Terlaksananya Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kab/Kota	Orang	50	50.550.000,00
Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kab/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Tentang Mekanisme Penggantian Hak atas Tanah dan/atau Bangunan	unit	1	
Rehabilitasi Rumah Bagi Korban Bencana	Terlaksananya Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kab/Kota	unit	10	6.740.600.000,00
Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi	unit	31	13.500.000.000,00
Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan Perumahan pada Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun	unit	8	500.512.900,00
Pembangunan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah pada Lokasi Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan	unit	105	11.801.221.000,00



Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target Kinerja	Pagu
1	2	3	4	5
PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Jumlah Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota			743.103.287.634,00
Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Persentase Kawasan Permukiman Kumuh dibawah 10 ha di kabupaten yang ditangani	Dokumen	1	
Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan PKP	Terlaksananya Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Dokumen	1	500.000.000,00
Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/Terlegalisasi	Dokumen	1	
Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Terlaksananya Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	unit	111	59.771.989.752,00
Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	Dokumen	1	667.600.645.262,00
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran / Peremajaan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Kesepakatan Kerja Sama dalam Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU	Laporan	1	189.969.620,00
Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Dokumen	1	591.863.000,00
Pelaksanaan Permukiman Kembali Kawasan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Data Permukiman Kumuh yang Terverifikasi	Ha	2	448.820.000,00



Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target Kinerja	Pagu
1	2	3	4	5
Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh	Luas Kawasan Permukiman Kumuh yang Dimukimkan Kembali	Ha	1	14.000.000.000,00
PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Luas Permukiman Kumuh yang Dipugar			894.897.800,00
Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Berkurangnya jumlah unit RTLH >10 ha	Laporan	1	
Pengawasan dan Pengendalian dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru	Terlaksananya Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Laporan	1	761.022.800,00
Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru	Orang	20	133.875.000,00
PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Jumlah Orang yang Mengikuti Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh			746.339.289.578,00
Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)			
Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Terlaksananya Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Dokumen	3	4.009.900.000,00
Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Lokasi	18	742.329.389.578,00



Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target Kinerja	Pagu
1	2	3	4	5
PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian			73.133.050,00
Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Kecil	Cakupan Penerbitan Ijin Pengembangan	Laporan	1	
Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil	Terlaksananya Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Kecil	Laporan	1	73.133.050,00
UPT Pertamanan dan Pemakaman Sangatta Utara	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil			2.661.100.000,00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Presentase Tata Kelola Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan			
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Paket	1	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	15.068.000,00



Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target Kinerja	Pagu
1	2	3	4	5
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	543.135.000,00
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Paket	1	
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	3	26.646.000,00
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	1	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	1	2.016.251.000,00
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jenis	1	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jenis	3	60.000.000,00
PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)			
Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Tersedianya Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Lokasi	1	
Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	Lokasi	1	0,00
UPT Pertamanan dan Pemakaman Sangatta Selatan				1.497.701.398,00



Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target Kinerja	Pagu
1	2	3	4	5
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Presentase Tata Kelola Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan			
Administrasi Umum Perangkat Daerah		Paket	1	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	74.224.000,00
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	60.234.000,00
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	19.434.000,00
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Paket	1	
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	4	444.887.000,00
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	1	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	1	762.790.840,00
PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)			
Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Tersedianya Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Lokasi	1	



Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target Kinerja	Pagu
1	2	3	4	5
Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	Lokasi	1	136.131.558,00

Sumber : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2025 (setelah perubahan)

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA





BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kutai Timur selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kutai Timur yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator tujuan dan sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2021-2026 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan Visi dan Misi Bupati dan Wakil bupati terpilih dan perangkat daerah mendukung di misi yang ke 3 yaitu Mewujudkan Pelayanan Dasar Bagi Masyarakat Secara Proporsional dan Merata di Kabupaten Kutai Timur.

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan



Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja tujuan/sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja tujuan/sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian tujuan/sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja tujuan/sasaran.

Predikat nilai capaian kerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja, sebagai berikut :

Tabel 3.1
Pengkategorian Capaian Kinerja

No	Kategori/Interpretasi	Rata-Rata % Capaian
1	Sangat Tinggi	$91 \leq 100$
2	Tinggi	$76 \leq 90$
3	Sedang	$66 \leq 75$
4	Rendah	$51 \leq 65$
5	Sangat Rendah	≤ 50

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Dalam laporan ini, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kutai Timur dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian



tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2021-2026 maupun Rencana Kerja Tahun 2025. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2025 dan Indikator Kinerja Utama Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.

A. Capaian Kinerja Organisasi

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kutai Timur juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kutai Timur tahun 2025 menunjukkan hasil sebagai berikut :



Tabel 3.2
Capaian Indikator Kinerja Utama
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2025

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Kategori	Sumber Data
1	Meningkatnya Konektivitas Antar Wilayah	Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	31%	31%	101%	Sangat tinggi	Evdoren 2025
2	Meningkatnya Infrastruktur Fasilitas Perumahan/permukiman	Persentase penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana	100%	86,81%	87%	Tinggi	Evdoren 2025
		Persentase Kawasan Permukiman Kumuh dibawah 10 ha di kabupaten yang ditangani	42,35%	43,20%	102%	Sangat tinggi	Evdoren 2025
		Berkurangnya jumlah unit RTLH	0,2494%	0,2492%	100%	Sangat tinggi	Evdoren 2025
		Cakupan Penerbitan Ijin Pengembangan	83,66%	82,86%	99%	Sangat tinggi	Evdoren 2025
		Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Keuangan	100%	100%	100%	Sangat tinggi	Evdoren 2025

Sumber : Evdoren tahun 2025



Uraian penjelasan tabel :

Capaian kinerja urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2025 secara umum menunjukkan hasil yang sangat baik dan berada pada kategori sangat tinggi. Dari keseluruhan indikator yang diukur, mayoritas telah mencapai bahkan melampaui target yang ditetapkan, sehingga menggambarkan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan yang didukung oleh perencanaan yang matang serta pengendalian yang optimal.

Pada sasaran meningkatnya konektivitas antar wilayah, indikator persentase perumahan yang telah dilengkapi Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) berhasil direalisasikan sebesar 31% dari target 31% dengan capaian 101% dan kategori sangat tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa penyediaan PSU telah dilaksanakan sesuai perencanaan dan mampu meningkatkan kualitas lingkungan hunian serta aksesibilitas kawasan perumahan.

Selanjutnya, pada sasaran meningkatnya infrastruktur fasilitas perumahan dan permukiman, indikator persentase penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana terealisasi sebesar 86,81% dari target 100%, dengan capaian 87% dan kategori tinggi. Meskipun belum mencapai target maksimal, capaian tersebut tetap menunjukkan kinerja yang baik. Selisih yang terjadi kemungkinan dipengaruhi oleh kendala teknis di lapangan, keterbatasan waktu pelaksanaan, maupun proses administrasi yang memerlukan penyesuaian.

Indikator persentase kawasan permukiman kumuh di bawah 10 hektare yang ditangani menunjukkan realisasi sebesar 43,20% dari target 42,35% dengan capaian 102% dan kategori sangat tinggi. Capaian ini mengindikasikan bahwa program penanganan kawasan kumuh berjalan efektif dan mampu memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kualitas lingkungan permukiman.

Pada indikator berkurangnya jumlah unit Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), realisasi mencapai 0,2492% dari target 0,2494% dengan capaian 100% dan kategori



sangat tinggi. Hal ini mencerminkan konsistensi pelaksanaan program perbaikan RTLH yang berkontribusi terhadap peningkatan kualitas hunian masyarakat.

Sementara itu, cakupan penerbitan izin pengembangan terealisasi sebesar 82,86% dari target 83,66% dengan capaian 99% dan kategori sangat tinggi. Realisasi yang mendekati target menunjukkan bahwa pelayanan perizinan telah berjalan efektif dan responsif, meskipun terdapat sedikit selisih yang kemungkinan disebabkan oleh kelengkapan persyaratan administrasi atau proses verifikasi teknis.

Terakhir, cakupan pelayanan administrasi perkantoran dan keuangan mencapai 100% dari target 100% dengan kategori sangat tinggi. Hal ini menegaskan bahwa tata kelola administrasi dan pengelolaan keuangan telah dilaksanakan secara tertib, akuntabel, dan mendukung kelancaran seluruh program teknis.

Secara keseluruhan, capaian kinerja tahun 2025 menunjukkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan telah berjalan efektif, efisien, dan sesuai dengan target yang ditetapkan. Ke depan, diperlukan penguatan pada aspek percepatan rehabilitasi rumah korban bencana agar dapat mencapai target optimal, serta mempertahankan kualitas tata kelola dan efektivitas program yang telah dicapai.



Perbandingan capaian kinerja tahun 2025 dengan capaian kinerja tahun sebelumnya atau tahun 2023 diuraikan pada tabel berikut :

Tabel 3.3
Perbandingan Capaian Kinerja

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	2024			2025		
			Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
1	Meningkatnya Konektivitas Antar Wilayah	Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	26%	26,32%	101,03%	31%	31%	101%
2	Meningkatnya Infrastruktur Fasilitas Perumahan/ permukiman	Persentase penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana	1,23%	39,56%	3,213.91%	100%	86,81%	87%
		Persentase Kawasan Permukiman Kumuh dibawah 10 ha di kabupaten yang ditangani	25%	37,84%	151,87%	42%	43,20%	102%
		Berkurangnya jumlah unit RTLH	0,25%	0,00%	0,00%	0,2494 %	0,2492%	100%
		Cakupan Penerbitan Ijin Pengembangan	76,06%	76,47%	100,54%	83,66 %	82,86%	99%
		Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Keuangan	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber : Evdoren tahun 2025



Uraian penjelasan tabel :

Secara umum, capaian kinerja urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman selama Tahun 2024 dan 2025 menunjukkan tren yang positif dan stabil. Mayoritas indikator mencapai bahkan melampaui target yang telah ditetapkan, meskipun terdapat beberapa dinamika capaian yang dipengaruhi oleh faktor teknis dan perencanaan.

Pada sasaran meningkatnya konektivitas antar wilayah, indikator persentase perumahan yang telah dilengkapi Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) menunjukkan kinerja yang konsisten dan sangat baik. Pada tahun 2024, realisasi mencapai 26,32% dari target 26% dengan capaian 101,03%. Selanjutnya pada tahun 2025, realisasi sebesar 31% dari target 31% dengan capaian 101%. Hal ini menunjukkan bahwa program penyediaan PSU berjalan efektif dan mampu mempertahankan kinerja optimal dari tahun ke tahun, sekaligus mencerminkan perencanaan yang realistis dan pengendalian pelaksanaan yang baik.

Pada sasaran meningkatnya infrastruktur fasilitas perumahan dan permukiman, indikator persentase penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana mengalami dinamika yang cukup signifikan. Pada tahun 2024, target ditetapkan sebesar 1,23%, namun realisasi mencapai 39,56% dengan capaian 3.213,91%. Capaian yang sangat tinggi ini mengindikasikan adanya peningkatan penanganan yang jauh melampaui target, kemungkinan karena tambahan intervensi program atau kebutuhan penanganan yang meningkat. Pada tahun 2025, target meningkat signifikan menjadi 100%, dengan realisasi sebesar 86,81% dan capaian 87%. Meskipun belum mencapai target penuh, capaian ini tetap berada pada kategori tinggi dan menunjukkan komitmen kuat dalam penanganan rumah korban bencana.

Indikator persentase kawasan permukiman kumuh di bawah 10 hektare yang ditangani menunjukkan kinerja yang sangat baik pada kedua tahun. Tahun 2024 mencatat realisasi sebesar 37,84% dari target 25% dengan capaian 151,87%. Pada tahun 2025, realisasi sebesar 43,20% dari target 42% dengan capaian 102%. Data ini



menunjukkan keberlanjutan upaya penanganan kawasan kumuh serta efektivitas program dalam meningkatkan kualitas lingkungan permukiman.

Pada indikator berkurangnya jumlah unit Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), terdapat perbedaan capaian yang cukup mencolok. Tahun 2024 menunjukkan target 0,25% namun realisasi 0,00%, sehingga capaian 0%. Hal ini mengindikasikan bahwa pada tahun tersebut belum terdapat penurunan unit RTLH sesuai target, yang kemungkinan dipengaruhi oleh keterbatasan anggaran, prioritas program, atau faktor teknis lainnya. Namun pada tahun 2025, kinerja menunjukkan perbaikan signifikan dengan realisasi 0,2492% dari target 0,2494% dan capaian 100%, sehingga program perbaikan RTLH kembali berjalan optimal.

Cakupan penerbitan izin pengembangan menunjukkan kinerja yang stabil dan sangat baik. Tahun 2024 mencatat realisasi 76,47% dari target 76,06% dengan capaian 100,54%, sedangkan tahun 2025 realisasi 82,86% dari target 83,66% dengan capaian 99%. Meskipun terdapat sedikit penurunan persentase capaian pada tahun 2025, kinerja tetap berada pada tingkat yang sangat tinggi dan menunjukkan pelayanan perizinan yang efektif serta responsif.

Sementara itu, cakupan pelayanan administrasi perkantoran dan keuangan pada kedua tahun konsisten mencapai 100% dari target 100%. Hal ini menunjukkan tata kelola administrasi dan pengelolaan keuangan yang tertib, akuntabel, dan mampu mendukung kelancaran pelaksanaan seluruh program teknis.

Secara keseluruhan, capaian kinerja Tahun 2024 dan 2025 menunjukkan bahwa sebagian besar indikator berada pada kategori sangat tinggi dan stabil. Terdapat peningkatan signifikan pada beberapa indikator, serta perbaikan kinerja pada aspek RTLH di tahun 2025. Ke depan, perlu dilakukan penguatan pada perencanaan target agar lebih proporsional dengan kapasitas pelaksanaan, serta menjaga konsistensi kinerja yang telah dicapai.



Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2025 dengan target jangka menengah yang terdapat pada dokumen perencanaan strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kutai Timur periode 2021-2026 diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.4
Tingkat Kemajuan Capaian Sasaran Strategis

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Target Akhir 2026	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5	$6=4/5*100$
1	Meningkatnya Konektivitas Antar Wilayah	Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	31%	37,51%	82,64%
2	Meningkatnya Infrastruktur Fasilitas Perumahan/ permukiman	Persentase penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana	86,81%	100%	86,81%
		Persentase Kawasan Permukiman Kumuh dibawah 10 ha di kabupaten yang ditangani	43,20%	47,33%	91,27%
		Berkurangnya jumlah unit RTLH	0,2492%	0,2494%	99,91%
		Cakupan Penerbitan Ijin Pengembangan	82,86%	92,03%	90,04%
		Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Keuangan	100%	100%	100%

Sumber : Evdoren tahun 2025 (Data diolah)



Uraian penjelasan tabel :

Berdasarkan tabel capaian kinerja Tahun 2025 terhadap Target Akhir Tahun 2026, dapat disampaikan analisis deskriptif sebagai berikut:

Secara umum, tingkat kemajuan pelaksanaan program menunjukkan tren yang positif dengan sebagian besar indikator telah mencapai lebih dari 80% dari target akhir 2026. Hal ini mencerminkan bahwa pelaksanaan program berada pada jalur yang tepat (on track), meskipun masih terdapat ruang percepatan pada beberapa indikator strategis.

Pada tujuan Meningkatnya Konektivitas Antar Wilayah, indikator Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum) telah mencapai realisasi sebesar 31% dari target akhir 37,51%, dengan tingkat kemajuan 82,64%. Capaian ini menunjukkan progres yang cukup baik, namun masih diperlukan optimalisasi penyediaan dan peningkatan kualitas PSU agar target akhir dapat tercapai secara maksimal pada tahun 2026.

Pada tujuan Meningkatnya Infrastruktur Fasilitas Perumahan/Permukiman, capaian indikator menunjukkan variasi tingkat kemajuan:

Persentase penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana telah mencapai 86,81% dari target akhir 100%, yang berarti masih terdapat kekurangan sekitar 13,19% yang perlu dipenuhi melalui percepatan penanganan dan dukungan pembiayaan.

Persentase kawasan permukiman kumuh di bawah 10 ha yang ditangani mencapai tingkat kemajuan 91,27%, yang menunjukkan kinerja penanganan kawasan kumuh sudah sangat progresif dan mendekati target akhir.

Berkurangnya jumlah unit RTLH menunjukkan tingkat kemajuan 99,91%, yang berarti hampir sepenuhnya mencapai target akhir 2026. Indikator ini menjadi salah



satu capaian paling optimal dan menunjukkan efektivitas program intervensi rumah tidak layak huni.

Cakupan penerbitan izin pengembangan telah mencapai 90,04%, mencerminkan sistem perizinan yang relatif stabil dan mendekati target yang ditetapkan.

Cakupan pelayanan administrasi perkantoran dan keuangan telah mencapai 100%, yang berarti target akhir telah terpenuhi sepenuhnya dan menunjukkan tata kelola administrasi yang sangat baik.

Secara keseluruhan, tingkat kemajuan rata-rata berada pada kategori tinggi hingga sangat tinggi. Indikator yang telah mencapai di atas 90% dapat difokuskan pada konsistensi dan kualitas hasil, sedangkan indikator dengan capaian sekitar 80%–86% memerlukan strategi percepatan melalui penguatan koordinasi, dukungan anggaran, dan peningkatan efektivitas pelaksanaan kegiatan pada tahun berjalan agar target akhir 2026 dapat dicapai secara optimal.



Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.5

Analisis Keberhasilan, Kegagalan dan Solusi

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/Kegagalan	Solusi yang dilakukan
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatnya Konektivitas Antar Wilayah	Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	31%	31%	101%	Keberhasilan ini didukung oleh perencanaan teknis yang matang, ketersediaan anggaran yang memadai, serta pengawasan pelaksanaan kegiatan yang optimal.	Mempertahankan pola perencanaan dan pengawasan yang telah berjalan baik, meningkatkan koordinasi dengan pengembang/perangkat daerah terkait, serta memastikan keberlanjutan pemeliharaan PSU yang telah dibangun.
2	Meningkatnya Infrastruktur Fasilitas Perumahan/permukiman	Persentase penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana	100,00%	86,81%	87%	Capaian belum memenuhi target 100%, meskipun masih dalam kategori tinggi. Hal ini dipengaruhi oleh kendala teknis di lapangan, keterbatasan waktu pelaksanaan, proses verifikasi penerima bantuan, atau penyesuaian data calon penerima manfaat.	Melakukan percepatan proses verifikasi dan validasi data, meningkatkan koordinasi lintas sektor, optimalisasi sisa waktu pelaksanaan kegiatan, serta penguatan monitoring dan evaluasi agar target dapat tercapai pada periode berikutnya.
		Persentase Kawasan Permukiman Kumuh dibawah 10 ha di kabupaten yang ditangani	42%	43,20%	102%	Realisasi melampaui target menunjukkan program penanganan kawasan kumuh berjalan sangat efektif. Hal ini mencerminkan sinergi program, ketepatan identifikasi lokasi prioritas, serta dukungan pembiayaan yang memadai.	Mempertahankan strategi penanganan berbasis skala prioritas, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan hasil pembangunan, serta memastikan keberlanjutan penanganan melalui perencanaan terpadu



No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/Kegagalan	Solusi yang dilakukan
		Berkurangnya jumlah unit RTLH	0,2494%	0,2492%	100%	Target penurunan RTLH tercapai secara optimal. Hal ini menunjukkan efektivitas program perbaikan rumah tidak layak huni serta ketepatan sasaran penerima manfaat.	Melanjutkan pendataan berkala RTLH, memperkuat validasi data penerima bantuan, serta meningkatkan kolaborasi dengan pemerintah desa/kelurahan untuk menjaga akurasi data dan keberlanjutan program.
		Cakupan Penerbitan Ijin Pengembangan	83,66%	82,86%	99%	Realisasi sangat mendekati target namun belum sepenuhnya tercapai. Selisih kecil kemungkinan disebabkan oleh permohonan yang belum memenuhi persyaratan administrasi atau proses verifikasi teknis yang masih berjalan.	Meningkatkan sosialisasi persyaratan perizinan kepada pemohon, mempercepat proses evaluasi teknis, serta mengoptimalkan sistem pelayanan berbasis digital untuk meningkatkan efisiensi.
		Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Keuangan	100%	100%	100%	Target tercapai sepenuhnya, menunjukkan tata kelola administrasi dan keuangan berjalan tertib, akuntabel, dan sesuai regulasi. Kondisi ini mendukung kelancaran pelaksanaan seluruh program teknis.	Mempertahankan sistem pengendalian internal yang efektif, meningkatkan kualitas SDM administrasi, serta memastikan konsistensi kepatuhan terhadap standar operasional dan regulasi yang berlaku.

Sumber : Evdoren tahun 2025 (Data diolah)

Uraian penjelasan tabel :

Secara umum, capaian kinerja menunjukkan hasil yang sangat baik dengan mayoritas indikator berada pada kategori sangat tinggi dan tercapai sesuai target. Indikator persentase perumahan yang telah dilengkapi PSU mencapai 101%,



mencerminkan perencanaan yang matang, dukungan anggaran yang memadai, serta pengawasan pelaksanaan yang optimal.

Pada sasaran peningkatan infrastruktur fasilitas perumahan dan permukiman, penanganan kawasan kumuh di bawah 10 ha berhasil melampaui target dengan capaian 102%, serta penurunan RTLH tercapai 100%, menunjukkan efektivitas intervensi program dan ketepatan sasaran. Cakupan penerbitan izin pengembangan mencapai 99%, yang mengindikasikan pelayanan perizinan berjalan sangat baik meskipun masih terdapat sedikit kendala administratif. Sementara itu, pelayanan administrasi perkantoran dan keuangan tercapai 100%, menegaskan tata kelola yang tertib dan akuntabel.

Adapun indikator penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana mencapai 87%, belum memenuhi target 100% akibat kendala teknis dan proses verifikasi data, namun tetap dalam kategori tinggi. Secara keseluruhan, kinerja tahun berjalan menunjukkan efektivitas pelaksanaan program, dengan fokus perbaikan pada percepatan kegiatan yang belum mencapai target maksimal.



Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Tabel 3.6

Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan

No.	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang / Tidak Menunjang
1	Menata semua layanan kebutuhan infrastruktur dasar dan Ekonomi Bagi Masyarakat Secara Proporsional dan Merata	IPD (Indek Pembangunan Desa)				
	Sasaran 1	Meningkatnya Konektivitas Antar Wilayah	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	100	Menunjang
			Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Tersedianya Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	100	Menunjang
			Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	100	Menunjang
			Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	100	Menunjang
	Sasaran 2	Meningkatnya Infrastruktur Fasilitas Perumahan/ permukiman	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana	86,81	Menunjang
			Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Tersedianya data Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	100	Menunjang



No.	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang / Tidak Menunjang
			Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	Jumlah Dokumen data Rumah yang Terkena Bencana Kabupaten/Kota berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah	100	Menunjang
			Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	100	Menunjang
			Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Terlaksananya Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kab/Kota	0	Tidak Menunjang
			Sosialisasi tentang Mekanisme Penggantian Hak atas Tanah dan/atau Bangunan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Tentang Mekanisme Penggantian Hak atas Tanah dan/atau Bangunan	0	Tidak Menunjang
			Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kab/Kota	86,81	Menunjang
			Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi	86,81	Menunjang
			Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun	0	Tidak Menunjang
			Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan Perumahan pada Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah pada Lokasi Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan	100	Menunjang
			Pembangunan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota	75	Menunjang
			PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase Kawasan Permukiman Kumuh dibawah 10 ha di kabupaten yang ditangani	102	Menunjang
			Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Terlaksananya Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	0	Tidak Menunjang



No.	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang / Tidak Menunjang
			Penyusunan/Review/L egalisasi Kebijakan Bidang PKP	Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/Terle galisasi	0	Tidak Menunjang
			Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Terlaksananya Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	100	Menunjang
			Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	100	Menunjang
			Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU	Jumlah Dokumen Kesepakatan Kerja Sama dalam Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU	100	Menunjang
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	100	Menunjang
			Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Data Permukiman Kumuh yang Terverifikasi	100	Menunjang
			Pelaksanaan Pemukiman Kembali Kawasan Permukiman Kumuh	Luas Kawasan Permukiman Kumuh yang Dimukimkan Kembali	100	Menunjang
			Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh	Luas Permukiman Kumuh yang Dipugar	100	Menunjang
			PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Berkurangnya jumlah unit RTLH >10 ha	100	Menunjang
			Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	50	Menunjang
			Pengawasan dan Pengendalian dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru	100	Menunjang



No.	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang / Tidak Menunjang
			Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	Jumlah Orang yang Mengikuti Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	0,00	Tidak Menunjang
			PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Cakupan Penerbitan Ijin Pengembangan	100	Menunjang
			Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Kecil	Terlaksananya Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Kecil	100	Menunjang
			Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil	100	Menunjang
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Presentase Tata Kelola Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan	100	Menunjang
			Perencanaan, Panganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Panganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	Menunjang
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100	Menunjang
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	100	Menunjang
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan	Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan	100	Menunjang



No.	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang / Tidak Menunjang
			Selain Renstra PD dan Renja PD	Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun		
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	Menunjang
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100	Menunjang
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	100	Menunjang
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Se mesteran SKPD	100	Menunjang
			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100	Menunjang
			Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	100	Menunjang
			Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	100	Menunjang
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100	Menunjang
			Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	100	Menunjang
			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	100	Menunjang
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	Menunjang
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	100	Menunjang
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100	Menunjang



No.	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang / Tidak Menunjang
			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	100	Menunjang
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	Menunjang
			Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	100	Menunjang
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	100	Menunjang
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	Menunjang
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	100	Menunjang
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	100	Menunjang
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	Menunjang
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	100	Menunjang
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	100	Menunjang

Sumber : Data diolah 2025



Uraian penjelasan tabel :

Secara umum, seluruh program dan kegiatan pada urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman telah memberikan kontribusi yang signifikan dalam mendukung tujuan penataan layanan kebutuhan infrastruktur dasar dan ekonomi masyarakat secara proporsional dan merata, yang diukur melalui Indeks Pembangunan Desa (IPD). Mayoritas indikator menunjukkan capaian 100% dan berstatus menunjang, sehingga secara keseluruhan pelaksanaan program berada dalam jalur yang selaras dengan sasaran strategis.

Pada Sasaran 1, yaitu meningkatnya konektivitas antar wilayah, Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) beserta seluruh turunannya terlaksana optimal dan sepenuhnya menunjang sasaran. Hal ini menunjukkan konsistensi antara perencanaan, pelaksanaan, dan output kegiatan dalam mendukung fungsi hunian dan konektivitas kawasan.

Pada Sasaran 2, yaitu meningkatnya infrastruktur fasilitas perumahan dan permukiman, sebagian besar program juga berjalan efektif dan menunjang sasaran, seperti penanganan kawasan kumuh, perbaikan RTLH, pelayanan sertifikasi dan perizinan, serta program penunjang administrasi pemerintahan. Namun demikian, terdapat beberapa sub kegiatan dengan capaian 0% dan berstatus tidak menunjang, seperti kegiatan sosialisasi tertentu, penyusunan kebijakan bidang PKP, serta penyadaran publik pencegahan kumuh. Kondisi ini menunjukkan adanya kegiatan yang belum terlaksana atau belum terealisasi pada tahun berjalan, meskipun secara umum tidak mengganggu pencapaian indikator program secara agregat.

Secara keseluruhan, struktur program dan kegiatan telah selaras dengan tujuan dan sasaran strategis. Tingkat dukungan yang dominan pada kategori menunjang menunjukkan konsistensi perencanaan dan implementasi. Ke depan, diperlukan evaluasi terhadap kegiatan yang belum terealisasi agar kesinambungan pencapaian tujuan dan kontribusi terhadap IPD dapat semakin optimal.



B. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dokumen Perjanjian Kinerja diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.7
Capaian Anggaran Program dan Kegiatan

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
	UPT Pertamanan dan Pemakaman Sangatta Utara	2.661.100.000	2.452.497.875	92,16
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.661.100.000	2.452.497.875	92,16
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	558.203.000	419.637.550	75,18
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	15.068.000	14.050.000	93,24
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	543.135.000	405.587.550	74,68
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	26.646.000	26.640.000	99,98
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	26.646.000	26.640.000	99,98
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.016.251.000	1.955.720.325	97,00
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.016.251.000	1.955.720.325	97,00
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	60.000.000	50.500.000	84,17
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	60.000.000	50.500.000	84,17
	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	-	-	-
	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	-	-	-
	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	-	-	-
2	UPT Pertamanan dan Pemakaman Sangatta Selatan	1.497.701.398	1.263.490.209	84,36
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.361.569.840	1.178.353.251	86,54
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	153.892.000	151.292.000	98,31
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	74.224.000	72.607.000	97,82
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	60.234.000	59.251.000	98,37
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	19.434.000	19.434.000	100,00
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	444.887.000	272.315.000	61,21
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	444.887.000	272.315.000	61,21



No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	762.790.840	754.746.251	98,95
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	762.790.840	754.746.251	98,95
	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	136.131.558	85.136.958	62,54
	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	136.131.558	85.136.958	0,00
	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	136.131.558	85.136.958	62,54
3	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	1.557.662.005.184	1.229.352.379.506	78,92
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	33.659.692.222	27.599.289.164	82,00
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	562.054.000	418.178.675	74,40
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	562.054.000	418.178.675	74,40
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	562.054.000	418.178.675	74,40
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	562.054.000	418.178.675	74,40
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	562.054.000	418.178.675	0,00
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	562.054.000	418.178.675	74,40
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	269.508.000	225.003.460	0,00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	150.813.000	88.774.000	58,86
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	141.733.000	104.401.215	73,66
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	25.415.823.256	20.148.459.164	79,28
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	24.782.283.256	19.573.586.165	78,98
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	476.828.000	447.462.000	93,84
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	156.712.000	127.410.999	81,30
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	-
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	-	-	-
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	-	-	-
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	200.000.000	199.756.500	99,88
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	200.000.000	199.756.500	99,88
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	-		#DIV/0!
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	491.235.066	461.690.776	0,00
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	156.898.205	151.389.550	96,49
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	294.378.000	272.446.492	92,55



No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	39.958.861	37.854.734	94,73
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	4.961.494.000	4.365.963.000	88,00
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1.748.232.000	1.374.599.000	78,63
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	3.213.262.000	2.991.364.000	93,09
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.729.085.900	1.711.858.258	99,00
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	336.000.000	334.639.350	99,60
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.393.085.900	1.377.218.908	98,86
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	300.000.000	293.382.791	97,79
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	200.000.000	197.762.791	98,88
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100.000.000	95.620.000	95,62
	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	33.591.704.900	10.253.737.100	30,52
	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	998.821.000	698.821.000	69,96
	Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	249.822.000	49.822.000	19,94
	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	748.999.000	648.999.000	86,65
	Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	50.550.000	-	0,00
	Sosialisasi tentang Mekanisme Penggantian Hak atas Tanah dan/atau Bangunan	50.550.000	-	0,00
	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	32.542.333.900	9.554.916.100	29,36
	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	6.740.600.000	2.387.087.000	35,41
	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	13.500.000.000		0,00
	Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan Perumahan pada Relokasi Program Kabupaten/Kota	500.512.900	267.368.100	53,42
	Pembangunan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota	11.801.221.000	6.900.461.000	58,47
	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	743.103.287.634	574.197.981.618	77,27
	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	500.000.000	-	0,00
	Penyusunan/Review/Legalisisasi Kebijakan Bidang PKP	500.000.000	-	0,00
	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	742.603.287.634	574.197.981.618	77,32
	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	59.771.989.752	51.520.738.550	86,20
	Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU	667.600.645.262	508.458.722.644	76,16
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	189.969.620	35.533.600	18,70



No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
	Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh	591.863.000	591.863.000	100,00
	Pelaksanaan Pemukiman Kembali Kawasan Permukiman Kumuh	448.820.000	421.366.000	93,88
	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh	14.000.000.000	13.169.757.824	94,07
	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	894.897.800	384.007.190	42,91
	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	894.897.800	384.007.190	42,91
	Pengawasan dan Pengendalian dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru	761.022.800	384.007.190	50,46
	Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	133.875.000	-	0,00
	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	746.339.289.578	616.903.509.972	82,66
	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	746.339.289.578	616.903.509.972	82,66
	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	4.009.900.000	3.857.317.278	96,19
	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	742.329.389.578	613.046.192.694	0,00
	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	73.133.050	13.854.462	0,00
	Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Kecil	73.133.050	13.854.462	18,94
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil	73.133.050	13.854.462	18,94

Sumber : Data diolah

C. Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah disajikan pada tabel berikut :



Tabel 3.8
Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tujuan dan Sasaran

NO	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
		Target	Realisasi	Persentase Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Capaian	
1	Menata semua layanan kebutuhan infrastruktur dasar dan Ekonomi Bagi Masyarakat Secara Proporsional dan Merata							
1.1	Meningkatnya Konektivitas Antar Wilayah							
1.1.1	Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	31%	31%	100%	746.475.421.136	616.903.509.972	83%	17%
1.2	Meningkatnya Infrastruktur Fasilitas Perumahan/ permukiman							
1.2.1	Persentase penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana	100%	86,81%	87%	33.591.704.900	10.253.737.100	31%	56%
1.2.2	Persentase Kawasan Permukiman Kumuh dibawah 10 ha di kabupaten yang ditangani	42%	43,20%	102%	743.103.287.634	574.197.981.618	77%	25%
1.2.3	Berkurangnya jumlah unit RTLH	0,2494%	0,2492%	100%	894.897.800	384.007.190	43%	57%
1.2.4	Cakupan Penerbitan Ijin Pengembangan	83,66%	82,86%	99%	73.133.050	13.854.462	19%	80%
1.2.5	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Keuangan	100%	100%	100%	37.682.362.062	31.230.140.290	83%	17%

Sumber : Data diolah



Uraian penjelasan tabel :

Secara umum, pelaksanaan tujuan Menata semua layanan kebutuhan infrastruktur dasar dan ekonomi bagi masyarakat secara proporsional dan merata menunjukkan kinerja yang sangat baik dengan tingkat efisiensi yang positif pada seluruh indikator sasaran.

Pada Sasaran 1.1 Meningkatnya Konektivitas Antar Wilayah, indikator Persentase Perumahan yang sudah dilengkapi PSU mencapai target 100% dengan realisasi anggaran sebesar 83% dari pagu. Hal ini menghasilkan tingkat efisiensi sebesar 17%, yang berarti target kinerja tercapai optimal dengan penggunaan anggaran yang lebih hemat dari perencanaan.

Pada Sasaran 1.2 Meningkatnya Infrastruktur Fasilitas Perumahan/Permukiman, seluruh indikator juga menunjukkan kategori efisien:

Indikator penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana mencapai 87% dengan realisasi anggaran 31%, menghasilkan efisiensi 56%. Hal ini menunjukkan output yang cukup tinggi dengan serapan anggaran relatif rendah.

Penanganan kawasan permukiman kumuh di bawah 10 ha bahkan melampaui target (102%) dengan realisasi anggaran 77%, sehingga tercatat efisiensi 25%. Kondisi ini dapat dikategorikan sangat efisien karena capaian melebihi target dengan penggunaan anggaran yang terkendali.

Pengurangan RTLH mencapai 100% dengan serapan 43%, sehingga tingkat efisiensi sebesar 57%, menunjukkan optimalisasi anggaran yang sangat baik.

Cakupan penerbitan izin pengembangan mencapai 99% dengan realisasi anggaran 19%, menghasilkan efisiensi 80%. Ini menunjukkan penggunaan anggaran yang sangat minimal namun capaian tetap mendekati target.



Cakupan pelayanan administrasi perkantoran dan keuangan mencapai 100% dengan realisasi 83%, sehingga efisiensi sebesar 17%, yang mencerminkan pengelolaan anggaran yang proporsional dan terkendali.

Secara keseluruhan, seluruh indikator menunjukkan nilai efisiensi positif (persentase capaian kinerja lebih tinggi dibanding persentase realisasi anggaran). Hal ini mengindikasikan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan telah berjalan efektif dan efisien, dengan optimalisasi penggunaan sumber daya keuangan tanpa mengurangi pencapaian target kinerja.

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam rangka pencapaian kinerja program dan kegiatan perangkat daerah disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.9

Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Program dan Kegiatan

NO	Program/kegiatan	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
		Target	Realisasi	Persentase Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Capaian	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	100	100	100%	33.659.692.222	27.599.289.164	82%	18%
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	100	100%	562.054.000	418.178.675	74%	26%
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	100	100%	25.415.823.256	20.148.459.164	79%	21%
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100	100	100%	200.000.000	199.756.500	100%	0%
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	100	100%	491.235.066	461.690.776	94%	6%
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	100	100%	4.961.494.000	4.365.963.000	88%	12%
	Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	100	100%	1.729.085.900	1.711.858.258	99%	1%



NO	Program/kegiatan	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
		Target	Realisasi	Persentase Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Capaian	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	100	100%	300.000.000	293.382.791	98%	2%
2	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	100	86,81	87%	33.591.704.900	10.253.737.100	31%	56%
	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	100	100	100%	998.821.000	698.821.000	70%	30%
	Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	100	0	0%	50.550.000	-	0%	0%
	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	100	86,81	87%	32.542.333.900	9.554.916.100	29%	57%
3	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN (BIDANG KAWASAN PERMUKIMAN)	42,35	43	102%	683.331.297.882	522.677.243.068	76%	25%
	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	100	0	0%	500.000.000	-	0%	0%
	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	100	100	100%	682.831.297.882	522.677.243.068	77%	23%
4	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	0,24942	0,2492	100%	894.897.800	384.007.190	43%	57%
	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	100	50	50%	894.897.800	384.007.190	43%	7%
5	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS UMUM (PSU) (BIDANG PSU)	31	31,48	102%	746.339.289.578	616.903.509.972	83%	19%
	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	100	100	100%	746.339.289.578	616.903.509.972	83%	17%
6	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	83,66	82,86	99%	73.133.050	13.854.462	19%	80%



NO	Program/kegiatan	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
		Target	Realisasi	Persentase Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Capaian	
	Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Kecil	100	100	100%	73.133.050	13.854.462	19%	81%

Sumber : Data diolah

Uraian penjelasan tabel :

Secara umum, sebagian besar program menunjukkan kinerja yang efektif dan efisien, ditandai dengan capaian kinerja yang tinggi serta persentase realisasi anggaran yang lebih rendah dibanding capaian output.

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota mencapai 100% kinerja dengan serapan anggaran 82%, sehingga efisiensi sebesar 18%. Seluruh kegiatan pendukung administrasi, keuangan, kepegawaian, pengadaan, dan pemeliharaan berada pada kategori efisien, bahkan beberapa kegiatan seperti perencanaan dan evaluasi kinerja (efisiensi 26%) menunjukkan optimalisasi anggaran yang cukup baik. Administrasi kepegawaian relatif seimbang (0% efisiensi) karena realisasi hampir sama dengan perencanaan.

Program Pengembangan Perumahan mencapai 87% kinerja dengan serapan anggaran 31%, menghasilkan efisiensi 56%. Hal ini menunjukkan penggunaan anggaran yang relatif rendah dibanding capaian output. Namun terdapat kegiatan sosialisasi yang tidak terealisasi (0%), sehingga perlu evaluasi perencanaan agar tidak terjadi penganggaran tanpa pelaksanaan.



Program Kawasan Permukiman melampaui target (102%) dengan serapan 76%, sehingga efisiensi 25% dan tergolong sangat baik. Meskipun terdapat satu kegiatan yang tidak terlaksana, secara agregat program tetap efektif karena kegiatan utama peningkatan kualitas kawasan terealisasi optimal.

Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh mencapai target 100% dengan serapan 43%, menunjukkan efisiensi 57%. Namun pada sub kegiatan pencegahan kumuh, capaian hanya 50%, sehingga perlu peningkatan implementasi agar lebih proporsional dengan alokasi anggaran.

Program Peningkatan PSU melampaui target (102%) dengan serapan 83%, menghasilkan efisiensi 19%. Ini menunjukkan pelaksanaan fisik yang baik dengan pengendalian anggaran yang efektif.

Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi dan Registrasi mencapai 99% dengan serapan hanya 19%, sehingga efisiensi sangat tinggi (80%). Hal ini menunjukkan kegiatan lebih bersifat administratif dengan kebutuhan anggaran relatif kecil namun output tetap optimal.

BAB IV PENUTUP





BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan Tahun Anggaran berjalan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah pada urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, secara umum capaian indikator menunjukkan kinerja yang baik dan berada pada kategori tinggi hingga sangat tinggi. Sebagian besar target kinerja dapat tercapai bahkan melampaui target yang ditetapkan. Selain itu, dari aspek pengelolaan keuangan, realisasi anggaran berada pada tingkat yang terkendali dengan capaian efisiensi positif pada mayoritas program dan kegiatan. Hal ini mencerminkan penerapan prinsip efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan.

Program strategis seperti peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU), pengembangan perumahan, penanganan kawasan permukiman kumuh, pengurangan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), serta peningkatan tata kelola administrasi pemerintahan telah memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kualitas infrastruktur dasar dan pelayanan publik. Kinerja tersebut menunjukkan adanya konsistensi antara perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan kegiatan.



Namun demikian, masih terdapat beberapa kegiatan yang belum terealisasi secara optimal dan menjadi bahan evaluasi untuk penyempurnaan perencanaan pada tahun berikutnya. Perangkat daerah berkomitmen untuk meningkatkan kualitas perencanaan berbasis kinerja, memperkuat pengendalian internal, serta mengoptimalkan monitoring dan evaluasi guna memastikan pencapaian target yang lebih baik di masa mendatang. Dengan demikian, pelaksanaan program dan kegiatan pada Tahun Anggaran berjalan dapat dinilai telah mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah secara akuntabel dan berorientasi hasil, serta sejalan dengan prinsip Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

